



This project is funded by the European Union



Kerangka Acuan

Konsultan Advokasi Bantuan Sosial Pemerintah untuk Komunitas Marjinal

Program ACTION (Active Citizen Building Solidarity in Response COVID-19)

A. Latar Belakang

Sudah hampir dua tahun, dunia dikejutkan oleh sebuah krisis kesehatan yang menyerang jutaan nyawa manusia. Pandemi COVID-19 menjadi bencana alam terbesar yang mengharuskan warga dunia mengalami banyak kerugian akibat kehilangan orang terkasih, pekerjaan, pendidikan, ruang, dan kesempatan. Di Indonesia, jumlah kasus COVID-19 hingga Juni 2021 mencapai 1.9 juta kasus dengan jumlah meninggal sebanyak 52.730 orang. Jumlah kasus ini jelas bukan angka semata. Di baliknya ada keluarga-keluarga yang dilanda kesedihan mendalam karena kehilangan, kesulitan mendapatkan akses kesehatan, serta mengalami penurunan pendapatan secara drastis akibat pemutusan hubungan kerja dan kebangkrutan usaha.

Temuan FGD Pamflet seputar mental health menunjukkan, orang muda, khususnya dari kelompok rentan dan termarginalkan, menjadi salah satu kelompok yang terdampak secara kesehatan mental dari Pandemi COVID-19. Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu terbesar. Tidak jarang teman-teman dari kelompok termarginalkan hanya mengandalkan bantuan dari masyarakat dan bantuan pemerintah. Namun, bantuan pemerintah nyatanya tidak dapat dijangkau secara menyeluruh oleh teman-teman dari kelompok termarginalkan, khususnya mereka yang secara administrasi kependudukan belum memiliki dokumen yang sah seperti KTP, surat izin tinggal (bagi yang berdomisili tidak sesuai dengan alamat KTP). Pada kalangan transgender misalnya, menurut data dari Jaringan Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA) sebanyak 34% teman-teman transgender tidak memiliki KTP. Hal ini berdampak pada akses terhadap bantuan pemerintah. Belum lagi risiko adanya perlakuan diskriminatif berkaitan dengan identitas mereka yang kerap kali ditunjukkan oleh masyarakat sekitar yang semakin membatasi akses kelompok marjinal untuk mendapatkan bantuan.

Berdasarkan hal di atas, Pamflet bersama Konsorsium ACTION (Active Citizen Building Solidarity in Response COVID-19) dengan dukungan Uni Eropa bermaksud melakukan asesmen, sosialisasi, dan edukasi seputar advokasi bantuan sosial pemerintah bagi kalangan orang muda dari kelompok termarginalkan. Rangkaian kegiatan ini dilakukan



This project is funded by the European Union



melalui diskusi kelompok terarah dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapabilitas perwakilan orang muda dari kelompok termarginalkan untuk dapat melakukan advokasi bantuan pemerintah sehingga dapat menjangkau kelompoknya. Untuk mewujudkan hal ini, Pamflet membutuhkan Konsultan Advokasi Bantuan Pemerintah yang akan membantu kami melakukan pemetaan akses dana bantuan melalui FGD dan informasi seputar prosedur serta hal-hal rinci berkaitan dengan dana bantuan pemerintah di level lokal maupun nasional. Semua informasi ini akan dirumuskan menjadi sebuah modul yang kemudian digunakan sebagai pedoman pelatihan di lima area intervensi: Jakarta Timur, Kabupaten Bogor, Kota Yogyakarta, Kota Makassar dan Kabupaten Lombok Timur.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman orang muda terhadap pemetaan bantuan pemerintah;
2. Mendorong orang muda untuk lebih mudah mengakses bantuan pemerintah
3. Meningkatkan kapabilitas orang muda dalam proses advokasi bantuan pemerintah berkaitan dengan pengaduan, keterbukaan akses bantuan, dll;

C. Rincian Pekerjaan

Memfasilitasi Diskusi Terarah dan Lokakarya

Konsultan yang terpilih akan memfasilitasi Diskusi Kelompok Terarah (FGD) dan Lokakarya di lima area intervensi. Berikut adalah rincian tugas konsultan:

1. Membuat panduan pertanyaan FGD terkait kemampuan mengadvokasi bantuan, tantangan dan hambatan yang dihadapi saat mengadvokasi bantuan, serta memetakan kembali pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang memberikan dana bantuan baik di tingkat pemerintah lokal maupun nasional.
2. Memimpin diskusi kelompok terarah sebagai penilaian awal kapasitas kelompok marjinal terkait kemampuan mengadvokasi bantuan, tantangan dan hambatan yang dihadapi saat mengadvokasi bantuan, serta memetakan kembali pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang memberikan dana bantuan baik di tingkat pemerintah lokal maupun nasional.
3. Mengkonseptualisasi lokakarya pemetaan akses dana bantuan antara kelompok termarginalkan dengan kelompok utama (*mainstream group*).



This project is funded by the European Union



4. Membuat laporan hasil observasi konsultan terhadap diskusi dan lokakarya yang sudah dilaksanakan per area, yang kemudian dijadikan bahan merumuskan modul.

Penulisan Modul Pemetaan Akses Dana Bantuan dan Advokasi

1. Menuliskan hasil FGD dan lokakarya ke dalam bab-bab modul.
2. Berkoordinasi dengan Tim Pamflet dalam melakukan penulisan modul termasuk dalam editing dan pedoman penulisan.

D. Kriteria

Adapun kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi Konsultan Advokasi Bantuan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki pemahaman dan nilai yang jelas untuk isu-isu orang muda, hak asasi manusia, HIV/AIDS, LGBTI, pengguna napza, disabilitas, dan isu rentan lainnya;
2. Memiliki pengalaman dalam perihal terkait advokasi dan komunikasi dengan Lembaga pemerintahan;
3. Memiliki pemahaman terhadap alur birokrasi akses bantuan sosial dan finansial;
4. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik;
5. Mengerti strategi komunikasi dan sensitif terhadap kelompok termarginalkan
6. Dapat bekerja dalam tim/individu.
7. Mampu bekerja sesuai deadline yang telah disepakati.

Jika kamu merasa memenuhi kriteria di atas, kirimkan CV, Portofolio, dan blueprint singkat panduan pertanyaan FGD dan section-section di modul ke nafilah@pamflet.or.id cc astried@pamflet.or.id dengan subjek email: Konsultan Advokasi Dana Bantuan ACTION_Nama. Contoh: Konsultan Advokasi_Sasi Prasitiwi. Kirimkan sebelum 30 Juli 2021, pukul 23.59 WIB.

Konsultan yang dipilih secara tim/individu akan dihitung kerja selama 4 hari untuk 5 area intervensi. Sementara, untuk pengerjaan modul, konsultan terpilih akan bekerja selama 5 hari.